



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 155/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang untuk merencanakan program dan anggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa dengan telah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Bupati Boyolali dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor: 900/39/185.735/36/2019 dan 791/PP.01.3-NPHD/3309/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020,

perlu ...

perlu adanya pedoman bagi KPU Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor:153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Memerhatikan ...

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 102/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran dalam Pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 2 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



EBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 155/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN  
DAN ANGGARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas dan mendukung efisiensi pelaksanaan kegiatan tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, maka disusunlah Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020. Penyusunan petunjuk teknis mendasari kegiatan yang ada dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan, Perencanaan, Perubahan dan Revisi Anggaran;
2. Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan;
3. Penyusunan Produk-Produk Hukum;
4. Sosialisasi dan Kehumasan;
5. Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
6. Pembentukan Badan Penyelenggara;
7. Operasional Perkantoran;
8. Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
9. Pemutakhiran Data Pemilih;
10. Pencalonan;
11. Pelaksanaan Kegiatan Kampanye;
12. Audit dan Pelaporan Dana Kampanye;

13. Pemungutan

13. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih;
14. Advokasi Hukum;
15. Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dan Penyusunan Pelaporan.

#### B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan dan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah untuk mempermudah, menyeragamkan dan sebagai landasan untuk memperoleh kepastian hukum bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

#### C. Ruang Lingkup

1. Penjelasan kegiatan, jenis belanja, dan output;
2. Petunjuk operasional kegiatan.

#### D. Ketentuan Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Boyolali 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Boyolali untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 secara langsung dan demokratis;
2. Pemilihan Umum Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu 2019 adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kabupaten Boyolali, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan Pilbup Boyolali 2020 di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan Pilbup Boyolali 2020 di tingkat desa atau kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga, Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
10. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pilbup Boyolali 2020.
12. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### PENJELASAN KEGIATAN TAHAPAN

#### A. Tahapan Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Anggaran.

Dalam rangka mendukung kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sesuai dengan alur perencanaan, dilaksanakan penyusunan kebutuhan dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020. Penyusunan dokumen anggaran tersebut dimulai dari evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Pilbup Boyolali 2015 sebelumnya sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan penyusunan kebutuhan dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

#### Pelaksanaan di KPU Kabupaten Boyolali

##### 1. Tahap Pelaksanaan

- a. KPU Kabupaten Boyolali bersama dengan TAPD membahas kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Revisi/Pengesahan Anggaran Hibah Pemilihan.

##### 2. Jenis Belanja

- a. Akun 521213 Belanja Honor output kegiatan.

Digunakan untuk membiayai:

- 1) Honorarium Kelompok Kerja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan yang terdiri dari:
  - (1) Pengarah sebanyak 2 (dua) orang;
  - (2) Penanggungjawab sebanyak 1 (satu) orang;
  - (3) Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
  - (4) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
  - (5) Anggota sebanyak 4 (empat) orang yaitu terdiri dari pejabat dan staf sekretariat KPU Kabupaten Boyolali/ instansi terkait/ dan pegawai non PNS yang ditetapkan KPA.

##### 3. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen program dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

B. Penyusunan ...

## B. Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan

### Pelaksanaan di KPU Kabupaten Boyolali

#### 1. Tahapan Pelaksanaan.

- a) Supervisi tata kelola keuangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
- b) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan PPK dan PPS;
- c) Evaluasi Keuangan dalam rangka persiapan penyusunan laporan keuangan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
- d) Penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

#### 2. Jenis Belanja

- a. Akun 521213 Belanja Honorarium Output Kegiatan.

Digunakan untuk membiayai:

Honorarium Kelompok Kerja Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan yang terdiri dari:

- (1) Pengarah sebanyak 2 (dua) orang;
- (2) Penanggungjawab sebanyak 1 (satu) orang;
- (3) Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
- (4) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
- (5) Anggota sebanyak 5 (lima) orang yaitu terdiri dari pejabat dan staf sekretariat KPU Kabupaten Boyolali/instansi terkait/dan pegawai non PNS yang ditetapkan KPA.

- b. Akun 521219 Belanja Non Operasional Lainnya.

Digunakan untuk membiayai:

- (1) Rapat-rapat internal;
- (2) Rapat pengelolaan keuangan hibah;
- (3) Supervisi tata kelola keuangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
- (4) Rapat monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan PPK;
- (5) Rapat evaluasi penyusunan Laporan Keuangan dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

#### 3. Output Kegiatan

Tersusunnya pertanggungjawaban keuangan KPU Kabupaten Boyolali pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 secara akuntabel.

### Pelaksanaan di Tingkat PPK

1. Tahapan pelaksanaan.

Bimtek pengelolaan keuangan oleh PPK kepada PPS.

2. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai Bimtek pengelolaan keuangan tingkat PPS oleh PPK

3. Output Kegiatan

Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan oleh PPS dan PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 secara akuntabel.

C. Tahapan Penyusunan dan Pengesahan Peraturan.

Tahapan Penyusunan Peraturan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 merupakan kegiatan untuk menyusun dan mengesahkan Peraturan berupa Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang merupakan hasil dari proses penyusunan secara internal maupun dengan stake holder terkait. Tujuan dari proses penyusunan ini adalah terwujudnya keputusan yang menjadi pedoman bagi Penyelenggara, Peserta dan masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

### Pelaksanaan di KPU Kabupaten Boyolali

1. Tahapan Pelaksanaan

Penyusunan Regulasi dalam rapat internal di lingkungan KPU Kabupaten Boyolali.

2. Jenis Belanja

a. Akun 521219 Belanja barang non operasional lainnya.

Digunakan untuk membiayai pembelian konsumsi, ATK dalam rangka rapat kerja persiapan, penyusunan regulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

b. Akun 521213 Honor output kegiatan.

Digunakan untuk membiayai Honorarium Kelompok Kerja KPU Kabupaten Boyolali dalam rangka penyusunan produk-produk hukum (Keputusan) selama 1 (satu) bulan yang terdiri dari:

- (1) Pengarah sebanyak 2 (dua) orang;
- (2) Penanggungjawab sebanyak 1 (satu) orang;
- (3) Ketua sebanyak 1 (satu) orang;

(4) Sekretaris ...

- (4) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
- (5) Anggota sebanyak 2 (dua) orang terdiri dari anggota KPU Kabupaten Boyolali (apabila secara teknis dibutuhkan)/ pejabat dan staf sekretariat Kabupaten Boyolali/ instansi terkait/ dan pegawai non PNS yang ditetapkan KPA.

### 3. Output Kegiatan

Tersusunnya dokumen Keputusan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

### D. Tahapan Sosialisasi

Kegiatan Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 memiliki peran strategis untuk merancang desain/arah, strategi, materi dan metode sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 agar informasi dapat tersebarluaskan dan mendorong kesadaran masyarakat dan *stakeholder* untuk berperan serta dalam setiap tahapan sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

1. Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi dan Parmas / Penyuluhan / Bimbingan Teknis.

#### Pelaksanaan di KPU Kabupaten Boyolali

##### a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten Boyolali membentuk kelompok kerja yang diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten Boyolali menjadi Kelompok Kerja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis untuk melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) bulan.

##### b. Jenis Belanja

###### 1) Akun 521213 Honor Output Kegiatan

###### a) Honor Kelompok Kerja

Digunakan untuk membiayai Kelompok Kerja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis selama 2 (dua) bulan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- (1) Pengarah sebanyak 2 (dua) orang;
- (2) Penanggungjawab sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Ketua sebanyak 1 (satu) orang.
- (4) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang

(5) Anggota ...

- (5) Anggota sebanyak 5 (lima) orang, yaitu Anggota KPU apabila secara teknis dibutuhkan/pejabat/staf/pegawai instansi lain/pegawai non PNS yg ditetapkan KPA.
  - b) Honor narasumber  
Digunakan untuk membiayai narasumber pada kegiatan :
    - (1) Sosialisasi kepada Parpol sebanyak 3 (tiga) kegiatan.
    - (2) Pemilih Perempuan sebanyak 1 (satu) kegiatan.
    - (3) Pemilih Difabel dan Marginal 2 (dua) kegiatan.
    - (4) Seminar “Mencari Pemimpin Boyolali”
  - c) Honor Moderator kegiatan “Mencari Pemimpin Boyolali”
- 2) Akun 521811 Belanja Persediaan Barang Konsumsi.  
Untuk pembelian belanja barang / bahan / media sosialisasi.
  - 3) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Output Kegiatan.
- c. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan kelompok kerja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
2. Dalam rangka Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

#### Pelaksanaan di KPU Kabupaten Boyolali

##### a. Tahap Pelaksanaan

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam Pilbup Boyolali 2020, KPU Kabupaten Boyolali melakukan serangkaian strategi dan program sosialisasi penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020 melalui Rapat Internal, peningkatan partisipasi masyarakat, rapat dengan instansi terkait, branding mobil, bimtek, sosialisasi di media massa cetak dan elektronik, launching tahapan sosialisasi di tingkat KPU dan PPK.

##### b. Jenis Belanja

###### 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai:

- (a) Pembelian Konsumsi (makan) untuk peserta rapat internal sejumlah 20 orang dalam 4 kegiatan;

(b) Pembelian ...

- (b) Pembelian Konsumsi (snack dan makan) untuk peserta rapat dengan instansi terkait Parmas sejumlah 20 orang dalam 4 kegiatan;
  - (c) Branding mobil;
  - (d) Rakor dan Bimtek;
  - (e) Sosialisasi di Media Massa Cetak dan Elektronik;
  - (f) Launching Tahapan;
  - (g) Sosialisasi KPU;
  - (h) Sosialisasi di Tingkat PPK.
- c. Output Hasil Kegiatan
- 1) Terlaksananya rapat internal dan kegiatan serta tersusunnya laporan rapat peningkatan partisipasi masyarakat dengan peserta instansi terkait dan mitra kerja sosialisasi di tingkat kabupaten.
  - 2) Tersusunnya strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilbup Boyolali 2020.
  - 3) Tersosialisasikannya tahapan penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020.
  - 4) Terwujudnya pemahaman yang sama mengenai Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020.
  - 5) terlaksananya kegiatan dan tersusunnya laporan Rapat Kerja Pembahasan Materi, Bentuk, Strategi dan Sasaran Sosialisasi Pilbup Boyolali 2020.
  - 6) terlaksananya kegiatan dan tersusunnya laporan rapat kerja PPK dengan PPS terkait pembahasan materi, metode, strategi dan sasaran sosialisasi Pilbup Boyolali 2020.
  - 7) Terlaksananya kegiatan dan tersusunnya laporan Rapat Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dengan Pemangku Kepentingan dan terbangunnya komitmen kerjasama yang bertujuan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilbup Boyolali 2020.
  - 8) terlaksananya kegiatan dan tersusunnya laporan laporan kegiatan workshop dengan Media Cetak dan Elektronik.
- E. Tahapan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Tahapan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan perlengkapan yang dibutuhkan dalam rangka tahapan Pilbup Boyolali 2020.

Pelaksanaan di KPU Kabupaten Boyolali.

1. Tahapan pelaksanaan.

- a. Menyelenggarakan Rapat Persiapan dalam rangka Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- b. Melakukan pemetaan terhadap Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

2. Jenis Belanja

a. Akun 521213 Honor output kegiatan.

Digunakan untuk membiayai honor tim pelaksana kegiatan yang terdiri:

- (1) Pengarah sebanyak 1 (satu) orang;
- (2) Penanggungjawab sebanyak 1 (satu) orang;
- (3) Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
- (4) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
- (5) Anggota sebanyak 6 (enam) orang, terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Boyolali, Pejabat dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali yang telah ditetapkan dalam Pokja, instansi terkait, dan pegawai non PNS yang telah ditetapkan oleh KPA.

b. Akun 521811 Belanja Persediaan Barang Konsumsi

Digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan:

- 1) Cetak Surat Suara;
- 2) Kotak dan Bilik Suara;
- 3) Penggandaan/Pencetakan Formulir:
  - a) Formulir Model A-KWK untuk pmutakhiran data pemilih;
  - b) Formulir Model B-KWK untuk pencalonan;
  - c) Formulir Model C-KWK untuk tingkat TPS/KPPS;
  - d) Formulir Model D-KWK;
  - e) Formulir Model DA-KWK;
  - f) Formulir Model DB-KWK;
  - g) Formulir untuk Pemungutan Suara Ulang;
- 4) Buku Panduan untuk PPK/PPS/PPDP
- 5) Pengadaan alat kelengkapan Pemungutan Suara tingkat TPS, meliputi:
  - a) Tinta;
  - b) Segel;
  - c) Bantalan alat pencoblos;
  - d) Tanda pengenal KPPS;

e) Tanda ...

- e) Tanda pengenal petugas ketertiban;
  - f) Tanda pengenal saksi;
  - g) Karet pengikat surat suara;
  - h) Lem/perekat;
  - i) Kantong plastik besar (pembungkus kotak);
  - j) Kantong plastik sedang (pembungkus plastik sedang);
  - k) Ballpoint non hitam (biru);
  - l) Kabel ties berlogo KPU;
  - m) Spidol besar hitam;
  - n) Spidol hitam kecil;
  - o) Stiker nomor kotak suara;
  - p) Alat bantu tuna netra (template);
  - q) Daftar pasangan calon;
  - r) Salinan DPT dan DPTb;
  - s) Hologram.
- 6) Pemungutan suara ulang :
- a) Segel;
  - b) Tanda pengenal KPPS;
  - c) Tanda pengenal petugas ketertiban;
  - d) Tanda pengenal saksi;
  - e) Karet pengikat surat suara;
  - f) Lem/perekat;
  - g) Kantong plastik besar (pembungkus kotak);
  - h) Kantong plastik sedang (pembungkus plastik sedang);
  - i) Ballpoint non hitam (biru);
  - j) Kabel ties berlogo KPU;
  - k) Spidol besar hitam;
  - l) Spidol hitam kecil;
  - m) Salinan DPT dan DPTb;
  - n) Hologram.
- 7) Tingkat PPK
- a) Segel;
  - b) Lem/perekat;
  - c) Kantong plastik besar (pembungkus kotak);
  - d) Ballpoint hitam;
  - e) Kabel ties berlogo KPU;
  - f) Spidol besar hitam;

- g) Spidol hitam kecil.
- 8) Tingkat KPU Kabupaten/Kota;
  - a) Segel
  - b) Ballpoint hitam;
  - c) Kabel ties berlogo KPU;
  - d) Spidol besar hitam;
  - e) Spidol hitam kecil.
- 9) Sampul meliputi :
  - a) Tingkat TPS;
  - b) Tingkat PPK;
  - c) Tingkat KPU Kabupaten Boyolali;
  - d) Pemungutan suara Ulang.
- c. Akun 521219 Belanja Operasional Lainnya  
Digunakan untuk membiayai kegiatan:
  - 1) Rapat Koordinasi internal untuk 15 (lima belas ) orang selama 2 (dua) bulan;
  - 2) Pengelolaan Logistik dan Eks Logistik dipergunakan untuk kegiatan sewa gudang, konsumsi proses logistik, kegiatan sortir dan pelipatan surat suara, belanja bahan untuk pengelolaan logistik, kegiatan penyiapan dan pembongkaran logistik, kegiatan penyiapan dan pembongkaran kotak dan bilik suara, pengelolaan eks logistik.

### 3. Output kegiatan

- a. Terlaksananya kegiatan pengadaan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
- b. Terpenuhinya logistik pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

## F. Tahapan Pembentukan Badan Penyelenggara

Tahapan Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS merupakan kegiatan untuk membentuk badan penyelenggara Pemilu tingkat Kecamatan (PPK), tingkat desa/kelurahan (PPS), tingkat TPS (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Tujuan dari proses Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP adalah terwujudnya badan penyelenggara Pemilihan pada Pilbup Boyolali 2020 yang berpedoman pada asas penyelenggara Pemilihan.

### Pelaksanaan di KPU Kabupaten Boyolali

#### 1. Tahapan Pelaksanaan

- a. Menyelenggarakan Rapat Persiapan dalam rangka Pembentukan PPK PPS, KPPS dan PPDP;
- b. Menyelenggarakan Rapat Kerja KPU Kabupaten Boyolali dalam rangka Pembentukan PPK dan PPS, KPPS dan PPDP serta Sekretariat PPK dan PPS.

#### 2. Jenis Belanja

- a. Akun 521213 Honor output kegiatan

Digunakan untuk membiayai:

Honor tim pelaksana kegiatan yang terdiri:

- (1) Pengarah sebanyak 1 (satu) orang;
- (2) Penanggungjawab sebanyak 1 (satu) orang;
- (3) Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
- (4) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
- (5) Anggota sebanyak 4 (empat) orang, terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Boyolali, Pejabat dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali yang telah ditetapkan dalam Pokja, instansi terkait, dan pegawai non PNS yang telah ditetapkan oleh KPA.

- b. Akun 521811 Belanja Persediaan Barang Konsumsi

Digunakan untuk membiayai kegiatan rapat internal, administrasi pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP, pelantikan dan Bimtek PPK, PPS, KPPS dan PPDP, orientasi tugas untuk PPK.

#### 3. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terpilihnya anggota PPK, PPS, KPPS dan PPDP yang berkompeten dan menjunjung asas-asas penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020.

### Pelaksanaan di KPU Kabupaten Boyolali

#### 1. Tahapan Pelaksanaan.

- a. Menghadiri Rapat Kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Boyolali dalam rangka Pembentukan PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan PPS;
- b. Menyelenggarakan Rapat persiapan internal KPU Kabupaten Boyolali dalam rangka pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP serta Sekretariat PPK;
- c. Melaksanakan rekrutmen Calon Anggota PPK, PPS, KPPS dan PPDP;

d. Melakukan ...

- d. Melakukan Pelantikan dan Pembekalan Anggota PPK dan Sekretariat PPK;
- e. Melakukan Pelantikan dan Pembekalan PPS;
- f. Melakukan orientasi tugas PPK.

## 2. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja barang non operasional lainnya.

- a. Digunakan untuk membiayai pembentukan PPK dan PPS;
- b. Pembentukan PPDP;
- c. Pembentukan KPPS.

## 3. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terpilihnya anggota PPK, PPS, PPDP dan KPPS yang berkompeten dan dan menjunjung asas-asas penyelenggaraan Pemilu.

### Pelaksanaan di Tingkat PPK

#### 1. Tahapan Pelaksanaan

- a. Melaksanakan Seleksi wawancara calon anggota PPS;
- b. Rapat Koordinasi PPK dengan PPS dalam rangka pembentukan PPDP;

#### 2. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terpilihnya anggota PPS dan PPDP yang berkompeten dan dan menjunjung asas-asas penyelenggaraan Pemilu.

### Pelaksanaan di Tingkat PPS

#### 1. Tahapan Pelaksanaan.

- a. Rekrutmen PPDP;
- b. Rekrutmen KPPS.

#### 2. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja barang non operasional lainnya.

Digunakan untuk membiayai pembentukan PPDP dan KPPS.

#### 3. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terpilihnya anggota PPDP dan KPPS yang berkompeten dan menjunjung asas-asas penyelenggaraan Pemilu.

## G. Operasional Perkantoran

Tahapan Operasional Perkantoran digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional Perkantoran Badan Penyelenggara di tingkat KPU Kabupaten Boyolali.

### Pelaksanaan di KPU Kabupaten Boyolali

#### 1. Tahapan ...

1. Tahapan Pelaksanaan.

Membiayai kegiatan operasional perkantoran meliputi ATK, Perjalanan Dinas, membayar honor untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu selama 12 (dua belas) bulan dan honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk 7 (tujuh) orang selama 12 (dua belas) bulan, untuk membiayai penggandaan dan penjilidan, langganan Internet, Sewa Mobil, dan tunjangan kecelakaan kerja.

2. Jenis Belanja.

a. Akun 521811 belanja Persediaan ATK

Untuk membiayai ATK operasional kantor dalam rangka Pilbup Boyolali 2020.

b. Akun 524111 belanja perjalanan dinas.

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas sebagai berikut:

- 1) Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Anggaran.
  - a) Dalam rangka konsultasi ke Pusat/Jakarta;
  - b) Dalam rangka konsultasi ke KPU Provinsi dan BPKP;
  - c) Dalam rangka raker/bintek/sosialisasi dengan KPU Pusat;
  - d) Dalam rangka revisi Hibah, Revisi Anggaran dan Konsultasi ke KPPN, KPKNL, Kanwil DJPBn, dan DJA;
- 2) Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksana Keuangan.
  - a) Dalam rangka konsultasi ke Jakarta;
  - b) Dalam rangka konsultasi ke KPU Provinsi;
  - c) Dalam rangka raker/bintek/sosialisasi dengan KPU Pusat;
  - d) Dalam rangka Supervisi Keuangan badan adhock.
- 3) Penyusunan Produk-Produk Hukum/Keputusan.
  - a) Dalam rangka konsultasi ke Jakarta;
  - b) Dalam rangka konsultasi ke KPU Provinsi;
  - c) Dalam rangka raker/bintek/sosialisasi dengan KPU Pusat;
- 4) Sosialisasi dan Kehumasan.
  - a) Dalam rangka konsultasi ke KPU Provinsi;
  - b) Dalam rangka raker/bintek/sosialisasi dengan KPU Pusat;
- 5) Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
  - a) Dalam rangka konsultasi ke KPU Provinsi;
  - b) Dalam rangka raker/bintek/sosialisasi dengan KPU Pusat;
  - c) Dalam rangka pengawasan pencetakan surat suara;
  - d) Dalam rangka monitoring pengadaan;
  - e) Dalam rangka verifikasi dan klarifikasi Pemenang Lelang;

6) Pembentukan ...

- 6) Pembentukan badan penyelenggara.
  - a) Dalam rangka konsultasi ke KPU Provinsi;
  - b) Dalam rangka monitoring pembentukan PPS;
  - c) Dalam rangka pengawasan pembentukan KPPS;
- 7) Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara.

Dalam rangka konsultasi ke KPU Provinsi.
- 8) Pemutakhiran Data Pemilih.
  - a) Dalam rangka raker/bintek/sosialisasi dengan KPU Pusat;
  - b) Dalam rangka menghadiri raker/rakor ke KPU Provinsi;
  - c) Dalam rangka cokit serentak;
  - d) Dalam rangka supervisi dan monitoring Pembentukan PPDP dan supervisi Validasi Data Pemilih ke PPK/PPS/TPS.
- 9) Pencalonan.
  - a) Dalam rangka konsultasi ke KPU Provinsi;
  - b) Dalam rangka raker/bintek/sosialisasi dengan KPU Pusat;
  - c) Dalam rangka monitoring dan Rekapitulasi dukungan Calon Perseorangan.
- 10) Pendaftaran Pencalonan Partai Politik dan Perseorangan.
  - a) Dalam rangka konsultasi ke KPU Provinsi;
  - b) Dalam rangka raker/bintek/sosialisasi dengan KPU Pusat dan KPU Provinsi;
  - c) Dalam rangka verifikasi administrasi pasangan calon di Jawa, di Jakarta dan di luar pulau Jawa.
- 11) Pelaksanaan kegiatan kampanye.
  - a) Dalam rangka konsultasi ke KPU Provinsi;
  - b) Dalam rangka raker/bintek/sosialisasi dengan KPU Pusat;
  - c) Dalam rangka supervisi dan monitoring ke PPK/PPS/TPS.
- 12) Audit dan Pelaporan Dana Kampanye.

Dalam rangka konsultasi ke KPU Provinsi/KAP.
- 13) Pemungutan, penghitungan dan Penetapan Calon Terpilih.
  - a) Dalam rangka raker/bintek/sosialisasi dengan KPU Pusat;
  - b) Dalam rangka konsultasi/raker/bintek/sosialisasi dengan KPU Provinsi;
- 14) Advokasi Hukum.
  - a) Dalam rangka raker/bintek/sosialisasi/sengketa/Konsultasi dengan KPU Pusat/MA/MK/DKPP;

b) Dalam ...

- b) Dalam rangka konsultasi ke KPU Provinsi/PTUN/Bawaslu Provinsi.
  - 15) Pelaksanaan Evaluasi Pilkada dan Penyusunan Laporan.
    - a) Dalam rangka pengiriman laporan ke KPU Pusat;
    - b) Dalam rangka konsultasi ke KPU Provinsi.
  - c. Akun 521213 belanja honor output kegiatan.
    - 1) Digunakan untuk membayar honor Bendahara pengeluaran pembantu untuk 1 (satu) orang selama 12 (dua belas) bulan;
    - 2) Digunakan untuk membayar honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk 7 (tujuh) orang selama 12 (dua belas) bulan.
  - d. Akun 521219 belanja Non Operasional lainnya.
    - 1) Penggandaan dan penjilidan.

Digunakan untuk membiayai penggandaan dan penjilidan kegiatan produk hukum, penggandaan kegiatan badan penyelenggara, penggandaan rutin.

      - a) Internet.

Digunakan untuk membiayai langganan internet.
      - b) BBM  
Digunakan untuk membiayai BBM Mobil Sewa Logistik.
      - c) Tunjangan Kecelakaan Kerja.

Digunakan untuk membayar tunjangan kecelakaan kerja PPK, PPS, PPDP, KPPS.
3. Output kegiatan
- Terselenggaranya operasional perkantoran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilbup Boyolali 2020.

#### Pelaksanaan di PPK

##### 1. Tahapan Pelaksanaan

Membiayai kegiatan operasional perkantoran meliputi ATK, Perjalanan Dinas, membayar honor Ketua dan Anggota PPK, untuk membiayai penggandaan dan penjilidan.

##### 2. Jenis Belanja

###### 1) Akun 521213 belanja Honor Output Kegiatan.

Untuk membiayai honor Ketua dan Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang selama 9 (sembilan) bulan.

###### 2) Akun 521219 belanja Non Operasional Lainnya.

Digunakan untuk membiayai ATK, Penggandaan DAA/DA konsumsi snack untuk rapat/sidang, snack untuk PPS dalam rangka sidang/rapat biasa mengundang PPS.

3) Akun 524111 belanja perjalanan dinas PPK.

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas PPK dalam kegiatan:

a) Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan:

- (1) Perjalanan dinas PPK ke KPU dalam kegiatan Asistensi Tata Kelola Keuangan Pilbup Boyolali 2020;
- (2) Perjalanan dinas PPK ke KPU terkait Monev Pengelolaan Keuangan PPK dan PPS;
- (3) Perjalanan dinas PPK ke KPU terkait Pertanggungjawaban Keuangan.

b) Pemutakhiran Data Pemilih:

- (1) Perjalanan dinas ke KPU terkait Penyusunan bahan pemutakhiran data pemilih;
- (2) Perjalanan dinas PPK ke KPU terkait rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tingkat Kabupaten;
- (3) Perjalanan dinas PPDP ke PPS.

c) Pencialonan:

- (1) Perjalanan dinas PPK ke KPU terkait Bintek Verifikasi Calon Perseorangan;
- (2) Perjalanan dinas PPK ke KPU terkait raker verifikasi dan rekapitulasi;
- (3) Perjalanan dinas PPK ke KPU dalam rangka penyerahan hasil verifikasi faktual.

d) Kampanye:

Perjalanan dinas PPK ke KPU terkait bintek Kampanye;

e) Logistik:

- (1) Perjalanan dinas PPK ke KPU terkait bintek logistik;
- (2) Dalam rangka supervisi, monitoring dan distribusi di PPS/KPPS;

f) Pemungutan, Penghitungan dan Penetapan Calon Terpilih:

- (1) Perjalanan dinas PPK ke KPU terkait bintek pemungutan dan penghitungan suara Pilbup Boyolali 2020;
- (2) Perjalanan dinas PPK ke KPU terkait bintek Rekapitulasi;
- (3) Perjalanan dinas PPK ke KPU terkait Pengiriman Kotak C1;

(4) Perjalanan ...

(4) Perjalanan dinas PPK ke KPU terkait rapat Pleno Penetapan Paslon Terpilih.

(5) Dalam rangka monitoring bintek penghitsu untuk perjalanan dalam kecamatan.

g) Tahapan kegiatan

Perjalanan dinas PPK ke KPU terkait tahapan Pilbup Boyolali 2020.

### 3. Output kegiatan

Terselenggaranya operasional perkantoran di tingkat PPK untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilbup Boyolali 2020.

### Pelaksanaan di PPS

#### 1. Tahapan Pelaksanaan

Membiayai kegiatan operasional perkantoran meliputi ATK, Perjalanan Dinas, membayar honor Ketua dan Anggota PPS selama 8 (delapan) bulan, untuk membiayai penggandaan dan penjilidan.

#### 2. Jenis Belanja

a. Akun 521213 belanja Honor Output Kegiatan.

1) Untuk membiayai honor Ketua dan Anggota PPS sebanyak 3 (Tiga) orang selama 8 (delapan) bulan serta honor Sekretaris dan staf sekretariat PPS sebanyak 3 (Tiga) orang selama 8 (delapan) bulan.

2) Membiayai honor PPDP sebanyak 1 (satu) orang selama 1 (satu) bulan.

b. Akun 521219 belanja operasional lainnya.

Digunakan untuk membiayai ATK, Penggandaan dan konsumsi snack untuk sidang/rapat biasa.

c. Akun 524111 belanja perjalanan dinas.

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas tingkat PPS meliputi:

1) Perjalanan dinas PPS ke PPK terkait Pertanggungjawaban Keuangan;

2) Pembentukan PPDP;

3) Perjalanan dinas PPS ke PPK penyusunan TPS;

4) Perjalanan dinas PPS ke PPK terkait konsultasi data pemilih/pleno/bintek;

5) Perjalanan dinas PPS ke PPK terkait penyerahan verifikasi dan

rekapitulasi ...

- rekapitulasi;
- 6) Perjalanan PPS ke PPK terkait penyerahan verifikasi dan rekapitulasi;
  - 7) Perjalanan dinas PPS ke PPK dalam rangka monitoring ke kampanye;
  - 8) Perjalanan dinas PPS ke PPK dalam rangka kegiatan kampanye;
  - 9) Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman C1 PPS ke PPK (hitung cepat);
  - 10) Perjalanan dinas ke PPK terkait tahapan.

### Pelaksanaan di KPPS

#### 1. Tahapan Pelaksanaan

##### a. Tahapan pemungutan suara

Digunakan untuk membayar honor Ketua dan Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang serta linmas sebanyak 2 (dua) orang dalam 1 (satu) paket kegiatan, pembuatan TPS, untuk membiayai penggandaan, membayar snack dan makan.

##### b. Tahapan pemungutan suara ulang

Membiayai kegiatan Pemungutan suara ulang untuk membayar honor Ketua dan Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang serta linmas sebanyak 2 (dua) orang dalam 1 (satu) paket kegiatan, bantuan pembuatan TPS, untuk membiayai penggandaan, membayar snack dan makan.

#### 2. Jenis Belanja

##### 1) Akun 521213 belanja Honor Output Kegiatan.

###### a) Tahapan pemungutan suara.

Digunakan untuk membayar honor Ketua dan Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang serta linmas sebanyak 2 (dua) orang dalam 1 (satu) paket kegiatan.

###### b) Tahapan pemungutan suara ulang.

Digunakan untuk membayar honor Ketua dan Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang serta linmas sebanyak 2 (dua) orang dalam 1 (satu) paket kegiatan.

##### 2) Akun 521219 belanja non operasional lainnya.

###### a) Tahapan pemungutan suara.

Digunakan untuk membiayai Pembuatan TPS, Penggandaan, snack dan makan.

b) Tahapan ...

b) Tahapan pemungutan suara ulang.

Digunakan untuk membiayai snack dan makanan bagi KPPS dan Linmas, bantuan pembuatan TPS PSU, Penggandaan.

H. Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Tahapan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara merupakan kegiatan untuk menyampaikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara atau logistik dalam Pilbup Boyolali 2020.

Pelaksanaan di KPU Kabupaten Boyolali

1. Tahapan Pelaksanaan

Membentuk pokja pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, menyelenggarakan rapat internal dan rapat koordinasi dengan PPK, Panwas Kabupaten Boyolali, Kepolisian, bintek dengan PPK dan distribusi PP termasuk bongkar muat logistik.

2. Jenis Belanja

a. Akun 521213 belanja Honor Output Kegiatan.

Digunakan untuk membiayai Honor tim pelaksana kegiatan di tingkat Kabupaten Boyolali yang terdiri:

- (1) Pengarah sebanyak 1 (satu) orang;
- (2) Penanggungjawab sebanyak 1 (satu) orang;
- (3) Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
- (4) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
- (5) Anggota sebanyak 8 (delapan) orang, terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Boyolali, Pejabat dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali yang telah ditetapkan dalam Pokja, instansi terkait, dan pegawai non PNS yang telah ditetapkan oleh KPA.

b. Akun 521219 belanja non operasional lainnya

Digunakan untuk rapat internal, rapat koordinasi dengan PPK, Panwas dan Kepolisian, bintek dengan PPK dengan peserta ketua dan anggota yang membidangi, dan untuk distribusi PP termasuk bongkar muat (pengangkutan kotak dan bilik suara dari gudang ke lokasi pengelolaan logistik, pengiriman dan penarikan logistik, pemungutan suara ulang).

3. Output kegiatan

Terselenggaranya ...

Terselenggaranya Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan tingkatannya.

#### Pelaksanaan di tingkat PPK

##### 1. Tahapan pelaksanaan

Digunakan untuk bintek pengelolaan dan teknis pendistribusian logistik dengan PPS dengan peserta Ketua PPS dan anggota yang membidangi, meliputi snack dan makan panitia serta snack dan makan peserta, backdrop, serta distribusi PP sewa gudang dan pengiriman logistik (termasuk bongkar muat).

##### 2. Jenis Belanja

Akun 521219 belanja non operasional lainnya

Digunakan untuk :

- (1) Backdrop serta makan dan snack bagi panitia dan peserta bintek pengelolaan dan teknis pendistribusian logistik dengan PPS dan.
- (2) Distribusi-Penarikan dan Pengiriman untuk sewa gudang dan pengiriman logistik(termasuk bongkar muat).

##### 3. Output kegiatan

Terlaksananya bintek pengelolaan dan teknis pendistribusian logistik dengan PPS.

#### Pelaksanaan di tingkat PPS

##### 1. Tahapan pelaksanaan

Digunakan pengiriman dan penarikan logistik ke TPS.

##### 2. Jenis belanja

Akun 521219 belanja non operasional lainnya.

Untuk pengiriman dan penarikan logistik ke TPS.

##### 3. Output kegiatan

Terlaksanakanya pengiriman dan penarikan logistik dari TPS.

#### I. Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki, dan mengumpulkan data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung/faktual. Proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dimulai dari penyusunan daftar pemilih, pencocokan, dan

penelitian ...

penelitian secara langsung kepada Pemilih dan daftar hasil pemutakhiran kemudian ditetapkan sebagai DPS, selanjutnya setelah pengumuman DPS dan dilakukan uji publik, DPS hasil perbaikannya selanjutnya ditetapkan sebagai DPT. Tujuan dari proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih ini adalah terwujudnya data dan daftar pemilih yang akurat sehingga hak warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pilbup Boyolali 2020 dapat terlayani dengan baik.

### Pelaksanaan di KPU Kabupaten Boyolali

#### 1. Tahapan Pelaksanaan

- a. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan peserta PPK sebanyak 2 orang;
- b. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan PPK dan instansi terkait;
- c. Melakukan konsultasi ke KPU Provinsi, monitoring, supervisi, dan asistensi ke PPK;
- d. Melakukan entry data PPDP ke dalam aplikasi SIPP.

#### 2. Jenis Belanja

- a. Akun 521213 Honor output kegiatan.

Digunakan untuk membiayai Honor tim pelaksana kegiatan di tingkat Kabupaten Boyolali yang terdiri :

- (1) Pengarah sebanyak 2 (dua) orang;
- (2) Penanggungjawab sebanyak 1 (satu) orang;
- (3) Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
- (4) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
- (5) Anggota sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Boyolali, Pejabat dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali yang telah ditetapkan dalam Pokja, instansi terkait, dan pegawai non PNS yang telah ditetapkan oleh KPA.

- b. Akun 521219 Belanja barang non operasional lainnya.

Digunakan untuk membiayai rapat internal, rapat dengan instansi terkait, raker penyusunan dan penetapan TPS, pengadaan bahan mutarlih, pemutakhiran data pemilih, uji publik, rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tingkat kabupaten dan entry PPDP ke dalam SIPP.

#### 3. Output Kegiatan

Output ...

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya daftar pemilih Pilbup Boyolali 2020 sebagai bahan pemutakhiran melalui cokolit secara faktual oleh PPDP di tingkat kabupaten.

#### Pelaksanaan di PPK

##### 1. Tahapan Pelaksanaan.

- a. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan peserta PPS dan PPDP;
- b. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan PPS;
- c. Melakukan konsultasi ke KPU Kabupaten Boyolali.

##### 2. Jenis Belanja.

- a. Akun 521219 Belanja barang non operasional lainnya.

Digunakan untuk membiayai:

- 1) Bimtek penyusunan TPS dan aplikasi pemutakhiran data pemilih;
- 2) Bimtek pemutakhiran data pemilih kepada PPDP oleh PPK;
- 3) Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tingkat kecamatan.

##### 3. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya daftar pemilih Pilbup Boyolali 2020 sebagai bahan pemutakhiran melalui cokolit secara faktual oleh PPDP di tingkat kecamatan.

#### Pelaksanaan di PPS

##### 1. Tahapan Pelaksanaan

- a. Melaksanakan uji publik DPS;
- b. Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tingkat desa.

##### 2. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja barang non operasional lainnya

Digunakan untuk membiayai Pembelian konsumsi Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tingkat desa.

##### 3. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya daftar pemilih Pilbup Boyolali 2020 sebagai bahan pemutakhiran melalui cokolit secara faktual oleh PPDP di tingkat PPS.

#### J. Tahapan Pencalonan.

Pencalonan merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam pelaksanaan Pilbup Boyolali 2020. Tahapan pencalonan dimulai dari

verifikasi ...

verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan yang dilaksanakan pada bulan Mei dan berakhir dengan kegiatan penetapan nomor urut pasangan calon. Berikut ini akan dijelaskan terkait kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama masa tahapan pencalonan tersebut.

1. Pembentukan Kelompok Kerja Dalam Rangka Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan.

Pelaksanaan di KPU Kabupaten Boyolali.

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten Boyolali membentuk kelompok kerja yang diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten Boyolali menjadi Kelompok Kerja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan untuk melaksanakan kegiatan Verifikasi Syarat Calon Perseorangan selama 2 (dua) bulan.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521213 Honor Output Kegiatan

Digunakan untuk membiayai honorarium Kelompok Kerja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan selama 2 (dua) bulan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- (1) Pengarah sebanyak 1 (satu) orang;
- (2) Penanggungjawab sebanyak 1 (satu) orang;
- (3) Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
- (4) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
- (5) Anggota sebanyak 8 (delapan) orang, yaitu Anggota KPU apabila secara teknis dibutuhkan/pejabat/staf/pegawai instansi lain/pegawai non PNS yg ditetapkan KPA.

2) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai:

a) Pelaksanaan kegiatan di KPU Kabupaten Boyolali.

Rapat internal, rapat dengan instansi terkait, bimtek Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, pelaksanaan Verifikasi Calon Perseorangan yang meliputi : Pengumuman dan Penyerahan Dokumen Perseorangan, penerimaan, penelitian serta memilah jumlah dukungan dan sebaran, rekapitulasi, verifikasi syarat administrasi dukungan ganda, perbaikan dukungan calon perseorangan,

memilah ...

memilah dukungan per kecamatan, raker verifikasi dan rekapitulasi.

b) Di tingkat PPK  
Bimtek Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan kepada PPS, Pelaksanaan Verifikasi syarat dukungan dan Rekapitulasi syarat dukungan.

c) Di tingkat PPS  
Verifikasi faktual syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Verifikasi perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

c. Output Kegiatan.

1) Di Tingkat Kabupaten Boyolali.

a) Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya verifikasi dan rekapitulasi persyaratan pasangan calon perseorangan Pilbup Boyolali 2020;

b) Tersampainya pemahaman tata cara verifikasi;

c) Tersusunnya dokumen laporan bimbingan teknis Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Pilbup Boyolali 2020;

d) Tersampainya Pengumuman kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik.

2) Di Tingkat Kecamatan.

a) Tersampainya pemahaman tata cara verifikasi di tingkat kecamatan;

b) Tersusunnya dokumen laporan bimbingan teknis Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Pilbup Boyolali 2020 di tingkat kecamatan.

3) Di Tingkat Desa/Kelurahan.

a) Tersampainya pemahaman tata cara verifikasi di tingkat desa/kelurahan;

b) Tersusunnya dokumen laporan bimbingan teknis Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Pilbup Boyolali 2020 di tingkat desa/kelurahan.

2. Pendaftaran Pencalonan Parpol dan Perseorangan.

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan Pendaftaran Pencalonan Parpol, Perseorangan serta pemeriksaan pasangan calon dan penetapan pasangan calon.

b. Jenis ...

b. Jenis Belanja.

1) Akun 521213 Honor Output Kegiatan.

a) Digunakan untuk membiayai honorarium Kelompok Kerja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon selama 2 (dua) bulan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- (1) Pengarah sebanyak 2 (dua) orang;
- (2) Penanggungjawab sebanyak 1 (satu) orang;
- (3) Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
- (4) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
- (5) Anggota sebanyak 4 (empat) orang, yaitu Anggota KPU apabila secara teknis dibutuhkan/pejabat/staf/pegawai instansi lain/pegawai non PNS yg ditetapkan KPA.

b) Digunakan untuk membiayai honorarium Kelompok Kerja pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon selama 1 (satu) bulan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- (1) Pengarah sebanyak 2 (dua) orang;
- (2) Penanggungjawab sebanyak 1 (satu) orang;
- (3) Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
- (4) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
- (5) Anggota sebanyak 4 (empat) orang, yaitu Anggota KPU apabila secara teknis dibutuhkan/pejabat/staf/pegawai instansi lain/pegawai non PNS yg ditetapkan KPA

c) Digunakan untuk membiayai honorarium operator Silon untuk 1 (satu) orang selama 2 (dua) bulan

2) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai:

- a) Rapat internal, rapat dengan instansi terkait;
- b) Pelaksanaan pendaftaran penetapan pasangan calon dan pengumuman pendaftaran pasangan calon.

c. Output Kegiatan

Terlaksananya Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon, terlaksananya pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon, input data Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon, tersampainya Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon, tersampainya pengumuman Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon di media elektronik dan media cetak.

## K. Tahapan Pelaksanaan Kampanye

Kegiatan Kampanye dalam Pilbup Boyolali 2020 adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok dalam Pilbup Boyolali 2020.

### Pelaksanaan di KPU Kabupaten Boyolali

#### 1. Tahap Pelaksanaan

Untuk melaksanakan kegiatan rapat internal, rapat koordinasi dengan Parpol/Tim Sukses dan Instansi terkait, Kampanye Damai/Ikrar, Debat Terbuka Pasangan Calon, Iklan di media massa cetak dan media massa elektronik, Bimtek, Raker dan Rakor Kampanye.

#### 2. Jenis Belanja

##### a. Akun 521213

1) Digunakan untuk membiayai Honor Pokja kegiatan di tingkat Kabupaten Boyolali yang terdiri :

- (1) Pengarah sebanyak 1 (satu) orang;
- (2) Penanggungjawab sebanyak 1 (satu) orang;
- (3) Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
- (4) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
- (5) Anggota sebanyak 4 (empat) orang, terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Boyolali, Pejabat dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali yang telah ditetapkan dalam Pokja, instansi terkait, dan pegawai non PNS yang telah ditetapkan oleh KPA.

##### 2) Honorarium lainnya

Untuk membiayai kegiatan Kampanye Ikrar Damai dan Debat Terbuka Pasangan Calon.

##### b. Akun 521811 Belanja Barang Persediaan untuk Barang Konsumsi

Digunakan untuk membiayai Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye.

##### c. Akun 521219

#### 1. Pelaksanaan di KPU Kabupaten Boyolali

Untuk membiayai Rapat Internal, rapat koordinasi dengan Parpol/Tim Sukses dan Instansi terkait, Kampanye Damai/Ikrar,

Debat Terbuka Pasangan Calon, Iklan di media massa cetak dan media massa elektronik, Bimtek, Raker dan Rakor Kampanye.

2. Pelaksanaan di tingkat PPK

Untuk membiayai raker dengan PPS.

3. Output Kegiatan

- a. Terlaksanakannya rapat persiapan fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan jadwal kampanye;
- b. Terbentuknya kesepakatan kampanye damai;
- c. Tersampainya visi dan misi pasangan calon;
- d. Tersampainya aturan kampanye ke Badan Penyelenggara.

L. Tahapan Audit dan Pelaporan Dana Kampanye

Tahapan Audit dan Pelaporan Dana Kampanye merupakan kegiatan untuk melaporkan aktifitas dana kampanye peserta Pilbup Boyolali 2020 yang terdiri dari kegiatan Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan dana Kampanye, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

Pelaksanaan di KPU Kabupaten Boyolali

1. Tahapan Pelaksanaan

- a. Menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi di KPU Provinsi dalam rangka Bimbingan Teknis Laporan Dana Kampanye;
- b. Konsultasi ke KPU Provinsi terkait kebijakan dan aplikasi dana Kampanye.

2. Jenis Belanja

1) Akun 521213

Honor output kegiatan

Digunakan untuk membiayai Honor pokja selama 2 (dua) bulan anggaran, terdiri:

- (1) Pengarah sebanyak 1 (satu) orang;
- (2) Penanggungjawab sebanyak 1 (satu) orang;
- (3) Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
- (4) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
- (5) Anggota sebanyak 2 (dua) orang, terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Boyolali, Pejabat/Staf Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali, instansi lain/pegawai non PNS yang yang ditetapkan oleh KPA.

2) Akun ...

2) Akun 521219

Belanja barang non operasional lainnya digunakan untuk membiayai

- a) Jasa Audit;
- b) Pengumuman ;
- c) Bimtek penyusunan dan pelaporan dana kampanye.

3. Output kegiatan

- a. terlaksanakannya proses tahapan laporan dana kampanye;
- b. Tersusunnya dokumen laporan dana kampanye yang terdiri dari Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
- c. Terlaksananya Audit Dana Kampanye terhadap Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- d. Publikasi Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan hasil audit laporan dana kampanye.

M. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih.

1. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pilbup Boyolali 2020. Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan suara adalah tahapan yang krusial pada penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020. Pada tahapan ini membutuhkan persiapan dan perencanaan yang sangat detil sehingga seluruh pemilih dapat terlayani dengan baik dan terpenuhi hak memilih pada Pilbup Boyolali 2020.

- a. Pembentukan Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan suara.

Pelaksanaan di KPU Kabupaten Boyolali.

1) Tahap Pelaksanaan.

KPU Kabupaten Boyolali membentuk kelompok kerja yang diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten Boyolali menjadi Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan suara untuk melaksanakan

kegiatan ...

kegiatan Pemungutan dan Penghitungan suara selama 1 (satu) bulan.

2) Jenis Belanja

a) Akun 521213 Honor Output Kegiatan

Digunakan untuk membiayai honorarium Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan suara selama 1 (satu) bulan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- (1) Pengarah sebanyak 2 (dua) orang;
- (2) Penanggungjawab sebanyak 1 (satu) orang;
- (3) Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
- (4) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
- (5) Anggota sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu Anggota KPU apabila secara teknis dibutuhkan/pejabat/staf/pegawai instansi lain/pegawai non PNS yg ditetapkan KPA.

3) Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Pemungutan dan Penghitungan suara Pilbup Boyolali 2020.

b. Rapat Persiapan KPU Kabupaten Boyolali dalam rangka Persiapan Pemungutan dan Penghitungan suara Pilbup Boyolali 2020.

Pelaksanaan di KPU Kabupaten Boyolali.

1) Tahap Pelaksanaan.

Menyelenggarakan rapat internal, rapat persiapan pemungutan dan penghitungan suara Pilbup Boyolali 2020, Bimbingan Teknis pemungutan dan penghitungan suara Pilbup Boyolali 2020, Rapat Koordinasi PPK dengan Panwascam/Bawaslu, Bimbingan Teknis rekapitulasi Pilbup Boyolali 2020, penerimaan formulir C1, pemindaian formulir C1.

2) Jenis Belanja.

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.

Digunakan untuk membiayai :

- a) rapat internal;
- b) rapat persiapan pemungutan dan penghitungan suara Pilbup Boyolali 2020;

c) Bimbingan ...

- c) Bimbingan Teknis pemungutan dan penghitungan suara Pilbup Boyolali 2020;
- d) Rapat Koordinasi PPK dengan Panwascam;
- e) Bimbingan Teknis rekapitulasi Pilbup Boyolali 2020;
- f) Penerimaan formulir C1 dan pemindaian formulir C1.

3) Output Kegiatan.

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen rapat persiapan pemungutan dan penghitungan suara Pilbup Boyolali 2020, memberikan pemahaman kepada badan ad hoc tentang proses pemungutan dan penghitungan suara Pilbup Boyolali 2020, adanya persamaan persepsi antara KPU, Panwaslu Kabupaten, PPK dan Panwascam, memberikan pemahaman kepada badan ad hoc tentang teknis dan tata cara rekapitulasi Pilbup Boyolali 2020, tersusunnya dokumen Formulir C1 dan terselesaikannya proses pindai Formulir C1.

Pelaksanaan di PPK.

1) Tahap Pelaksanaan.

Pelaksanaan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara Pilbup Boyolali 2020 oleh PPK.

2) Jenis Belanja.

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.

Digunakan untuk membiayai Pelaksanaan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara Pilbup Boyolali 2020 oleh PPK.

3) Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen laporan penyelenggaraan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara Pilbup Boyolali 2020 serta memberikan pemahaman kepada PPS tentang teknis dan tata cara penghitungan suara Pilbup Boyolali 2020.

Pelaksanaan di PPS.

1) Tahap Pelaksanaan.

Pelaksanaan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara Pilbup Boyolali 2020 oleh PPS kepada KPPS dan layanan pemilih di rumah sakit/puskesmas oleh petugas KPPS.

2) Jenis ...

2) Jenis Belanja.

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai pelaksanaan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara Pilbup Boyolali 2020 oleh PPS kepada KPPS dan transport KPPS dalam rangka layanan pemilih di rumah sakit/puskesmas oleh petugas KPPS.

3) Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen laporan penyelenggaraan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara Pilbup Boyolali 2020 serta memberikan pemahaman kepada KPPS tentang teknis dan tata cara penghitungan suara Pilbup Boyolali 2020, terlayannya pengguna hak pilih di rumah sakit/puskesmas.

2. Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih.

Pelaksanaan di KPU Kabupaten Boyolali.

a. Tahap Pelaksanaan.

KPU Kabupaten Boyolali membentuk kelompok kerja yang diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten Kabupaten Boyolali menjadi Kelompok Kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk melaksanakan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara selama 1 (satu) bulan.

b. Jenis Belanja.

1) Akun 521213 Honor Output Kegiatan.

Digunakan untuk membiayai honorarium Kelompok Kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara selama 1 (satu) bulan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- (1) Pengarah sebanyak 2 (dua) orang;
- (2) Penanggungjawab sebanyak 1 (satu) orang;
- (3) Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
- (4) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
- (5) Anggota sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu Anggota KPU apabila secara teknis dibutuhkan/pejabat/staf/pegawai instansi lain/pegawai non PNS yg ditetapkan KPA.

2) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional

Digunakan untuk membiayai rapat persiapan dan pelaksanaan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Boyolali

2020 tingkat kabupaten, rapat persiapan dan rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Boyolali 2020, tersusunnya dokumen hasil Rekapitulasi, terlaksananya rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih dan tersusunnya dokumen hasil penetapan pasangan calon terpilih Pilbup Boyolali 2020.

Pelaksanaan di PPK

a. Tahap Pelaksanaan.

PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Boyolali 2020 di tingkat Kecamatan.

b. Jenis Belanja.

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional.

Digunakan untuk membiayai Pelaksanaan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Boyolali 2020 di tingkat Kecamatan.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Boyolali 2020 dan tersusunnya dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Boyolali 2020.

N. Tahapan Advokasi Hukum

Tahapan Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum merupakan kegiatan untuk menyelesaikan Sengketa Pilbup Boyolali 2020. Tahapan Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum dilaksanakan pada tingkat Bawaslu, DKPP, PTUN di Jawa Tengah, PTTUN Surabaya, MA dan MK.

Pelaksanaan di KPU Kabupaten Boyolali

1. Tahapan Pelaksanaan.

Menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi di KPU Provinsi dalam rangka penyelesaian Sengketa Pemilihan dan Sengketa Hasil Pilbup Boyolali 2020 di tingkat Bawaslu, PTUN, PTTUN, DKPP, MA dan MK.

2. Jenis Belanja.

a. Akun 521213

Honor output kegiatan digunakan untuk membiayai Honor pokja selama 2 (dua) bulan anggaran, terdiri:

- (1) Pengarah sebanyak 1 (satu) orang;
- (2) Penanggungjawab sebanyak 1 (satu) orang;
- (3) Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
- (4) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
- (5) Anggota sebanyak 2 (dua) orang, terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Boyolali, Pejabat/Staf Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali, instansi lain/pegawai non PNS yang yang ditetapkan oleh KPA.

b. Akun 521219

Belanja barang non operasional lainnya.

Digunakan untuk membiayai Rapat internal dan rapat dengan instansi terkait, penggandaan barang bukti, jasa penyelesaian perkara Pilbup Boyolali 2020, dan biaya leges.

3. Output Kegiatan.

Output dari kegiatan ini adalah terselesaikannya Sengketa Pilbup Boyolali 2020 di setiap tingkatan.

O. Tahapan Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan evaluasi penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020 ini sangat penting dan strategis mengingat sebagai lembaga penyelenggara pemilihan, KPU Kabupaten Boyolali diwajibkan untuk melakukan evaluasi dan membuat laporan semua tahapan penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020. Beberapa poin yang menjadi bahan evaluasi, mulai dari sistem pemilihan, penyelenggaraan pemilihan, aktivitas proses pemilihan, serta tingkat integritas hasil pemilihan yang dapat diterima secara baik oleh masyarakat. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik, maka seluruh informasi yang dikumpulkan harus bersifat independen, obyektif, relevan, dapat diverifikasi, handal, dipercaya, tepat waktu, serta menggunakan metode pengumpulan dan analisis data yang tepat, transparan dan bisa diakses oleh publik secara luas. Dengan begitu, maka hasil evaluasi nantinya akan benar-benar objektif, valid secara metodologis dan bisa dipercaya oleh banyak kalangan, khususnya kalangan akademisi, peneliti dan pegiat pemilu di Tanah Air. Laporan evaluasi penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020 ini sangat penting bagi penyelenggara pemilihan maupun masyarakat

Indonesia pada umumnya untuk mengetahui sejauh mana Pilbup Boyolali 2020 telah berhasil diselenggarakan dengan memenuhi kriteria pemilihan yang demokratis, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Boyolali dalam penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020, serta menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan di pemilihan berikutnya.

### Pelaksanaan di KPU Kabupaten Boyolali

#### 1. Tahapan Pelaksanaan

- a) Melaksanakan Raker dengan instansi terkait;
- b) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pilbup Boyolali 2020 dan pembubaran PPK.

#### 2. Jenis Belanja

- a) Akun 521213 Honor output kegiatan.

Digunakan untuk membiayai honor pokja yang terdiri dari:

- (1) Pengarah sebanyak 2 (dua) orang;
- (2) Penanggungjawab sebanyak 1 (satu) orang;
- (3) Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
- (4) Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
- (5) Anggota sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Boyolali, Pejabat dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali yang telah ditetapkan dalam Pokja, instansi terkait, dan pegawai non PNS yang telah ditetapkan oleh KPA.

- b) Akun 521219 Belanja barang non operasional lainnya.

Digunakan untuk:

- a) Rapat internal;
- b) Pencetakan buku laporan;
- c) Raker evaluasi pelaksanaan Pilbup Boyolali 2020 dan pembubaran PPK.

#### 3. Output Kegiatan

Capaian kegiatan yang diharapkan tercapai adalah terlaksananya evaluasi penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020, antara lain:

- a) Laporan kegiatan;

b) Daftar ...

- b) Daftar inventarisasi permasalahan yang dihadapi beserta solusi/langkah kerja pemecahan masalah tersebut.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 2 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI